

**EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA BANJAR LOPAK
KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial
Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara*



Oleh :

YUYUN MELDA YANTI

210411062

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Jum'at
Tanggal : 16
Bulan : Mei
Tahun : 2025

Tim Penguji

KETUA



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

SEKRETARIS



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

1. DESRIADI, S.Sos., M.Si (Pembimbing I) 
2. SARJAN M, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji I) 
3. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si (Anggota Penguji II) ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



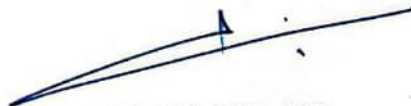
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA
BANJAR LOPAK KECAMATAN BENAI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA : YUYUN MELDA YANTI
NPM : 210411062
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

ABSTRAK

EVALUASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI DESA BANJAR LOPAK KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

YUYUN MELDA YANTI
210411062

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa. Bantuan Langsung Tunai Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang kemudian bersumber dari dana desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa, dan mengurangi dampak ekonomi. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data menggunakan langkah pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Banjar Lopak sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat sebagian kecil penerima yang kurang tepat menurut kriteria yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Evaluasi, BLTDD.

ABSTRACT***EVALUATION OF DIRECT CASH ASSISTANCE FROM VILLAGE FUNDS
IN ECONOMIC RECOVERY IN BANJAR LOPAK VILLAGE, BENAI
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY***

***YUYUN MELDA YANTI
210411062***

Direct Cash Assistance from village Fund (BLT-DD) is assistance that comes from village funds. Direct Village Cash Assistance is the provision of cash to poor or underprivileged families in the village which is then sourced from village funds. This provision aims to help poor village residents and reduce the economic impact. The purpose of this research is to find out how to evaluate the direct cash assistance program for village funds in economic recovery in Banjar Lopak Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. This research uses a qualitative descriptive research method. This research is a type of field research. This research uses the Snowball Sampling technique. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods. Data analysis uses the steps of data collection, data analysis and drawing conclusions. The research was conducted in Banjar Lopak Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. The results of this research illustrate that recipients of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT DD) in Banjar Lopak Village are doing quite well, but there are still recipients who are not appropriate according to the predetermined criteria.

Keywords: *Evaluation, BLTDD.*

DAFTAR ISI

Halaman :

TANDA PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
KATA PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRAK</i>.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.1.1 Teori Administrasi Negara	9
2.1.2 Teori Evaluasi Kebijakan	11
2.1.3 Bantuan Langsung Tunai.....	13
2.1.4 Teori Dana Desa	16
2.1.5 Teori Desa	18
2.1.6 Teori Kemiskinan	19
2.2 Kerangka Pemikiran.....	21
2.3 Definisi Operasional.....	22

2.4 Konsep Variabel.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Informan	25
3.3 Sumber Data Penelitian	25
3.3.1 Data Primer	25
3.3.2 Data Sekunder	26
3.4 Fokus Penelitian.....	26
3.5 Lokasi Penelitian	26
3.6 Metode Pengumpulan Data	26
3.6.1 Melalui Metode Wawancara	26
3.6.2 Melalui Metode Observasi	27
3.6.3 Melalui Metode Dokumentasi	27
3.7 Metode Analisis Data.....	27
3.7.1 Pengumpulan Data	27
3.7.2 Analisis Data	28
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	28
3.8 Jadwal Penelitian.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
4.1 Sejarah Desa Banjar Lopak.....	30
4.2 Keadaan Geografis.....	31
4.3 Keadaan Penduduk.....	31
4.4 Sarana Ibadah.....	32
4.5 Sarana Sosial dan Olahraga.....	33
4.6 Sarana Pendidikan.....	33
4.7 Mata Pencarian.....	34
4.8 Struktur Pemerintah Desa	35
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	37
5.1 Identitas Informan.....	37

5.1.1 Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin	37
5.1.2 Informan Menurut Kelompok	38
5.1.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
5.2 Hasil dan Pembahasan	39
5.2.1 Indikator Efektivitas.....	40
5.2.1.1 Pendataan	40
5.2.1.2 Verifikasi	43
5.2.1.3 Penetapan	46
5.2.2 Indikator Kecukupan	49
5.2.2.1 Menetapkan Kriteria Penerima BLT DD	49
5.2.2.2 Tepat Kriteria	52
5.2.3 Indikator Pemerataan	54
5.2.3.1 Pendataan Menyeluruh	55
5.2.3.2 Penetapan Sesuai Kriteria	57
5.2.4 Indikator Responsivitas	59
5.2.4.1 Keterbukaan	60
5.2.4.2 Komunikatif	62
5.2.5 Indikator Ketepatan	65
5.2.5.1 Tepat Sasaran	65
5.2.5.2 Tidak Tepat Sasaran	67
BAB VI PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ditimbulkan oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi suatu negara diantara pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga hal tersebut merupakan persoalan besar bagi banyak negara di dunia untuk terus meningkatkan pembangunan ekonominya agar tidak semakin terpuruk dalam perkembangan zaman yang kian mengalami perubahan (Dewi, 2011)

Kemiskinan adalah ketika hidup seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan telah mejadi sebuah persoalan kehidupan manusia. Sebagai sebuah persoalan kehidupan manusia, maka kemiskinan telah hadir juga dalam berbagai analisis dan kajian yang dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata dari upaya memberi jawab kepada persoalan kemiskinan. Bahkan tidak hanya sebatas itu, kemiskinan juga telah hadir dalam sejumlah kebijakan baik oleh elemen-elemen sosial masyarakat mapun pemerintah dalam menunjukkan kepedulian bersama untuk menangani persoalan kemiskinan ini.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Di Desa juga ditentukan sekian penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin. Selain itu Desa juga diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 mengatur tentang rincian prioritas penggunaan dana desa tahun 2024.

Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa. Sementara itu, Untuk penyediaan BLT DD alokasi dana yang dapat digunakan maksimal 25% dari total pagu dana desa di setiap desa.

BLT-DD merupakan bantuan langsung berupa uang tunai. Adapun Jumlah BLT-DD yang diterima oleh Masyarakat senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

untuk bulan pertama sampai bulan ke-12 (belas)/keluarga penerima manfaat. BLT-DD yang di peroleh masyarakat adalah bentuk uang tunai yang bertujuan untuk keperluan-keperluan pokok anggota masyarakat.

Dari ketentuan tersebut ditetapkan persyaratan atau kriteria calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exelusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu dan berdomisili
- b. Keluarga miskin yang tidak menerima bantuan PKH atau BPNT
- c. Keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBD ataupun APBN
- d. Jompo yang mempunyai KK Tunggal
- e. Jompo 60 tahun keatas walaupun tidak KK Tunggal
- f. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

Monitoring dan evaluasi skema BLT-DD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan beberapa TPK (Tim Pelaksana) yang dibentuk langsung oleh Kepala Desa di masing-masing wilayahnya. (Prabandarai, 2020).

Tabel I. 1 : Jumlah Penduduk di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi .

No	Jumlah KK	Jumlah Penduduk			RTM		Penerima BLT
		LK	PR	Jumlah	KK	%	
1	211 KK	388	354	740	128	17%	16 KK

Sumber: Kantor Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai, 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dihuni oleh 740 jiwa dengan rincian 388 laki-laki, 354 perempuan. Jumlah penduduk di lihat dari Kepala Keluarga sebanyak 211 KK dengan rata-rata terdiri dari 3 orang untuk setiap kepala keluarga yang tersebar di 6 RT dan 3 RW. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat beberapa kepala keluarga penerima bantuan langsung tunai dan bantuan lainnya. Adapun data penerima bantuan sebagai berikut:

Tabel I. 2 : Jenis Bantuan Dan Penerima Bantuan di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi .

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima (Orang)
1	PKH	45 Orang
2	BPNT	67 Orang
3	BLT DD	
	Penerima BLT Tahun 2020 (Rp 600.000)	22 KK
	Penerima BLT Tahun 2021 (Rp 300.000)	19 KK
	Penerima BLT Tahun 2022 (Rp 300.000)	36 KK
	Penerima BLT Tahun 2023 (Rp 300.000)	20 KK
	Penerima BLT Tahun 2024 (Rp 300.000)	16 KK

Sumber: Desa Banjar Lopak, 2024

Data yang ditampilkan di atas memberikan penjelasan bahwa masyarakat di Desa Banjar Lopak menerima beragam bantuan dari pemerintah yang salah satunya bantuan yang diterima oleh masyarakat adalah BLT Dana Desa. Adapun total bantuan langsung tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah desa banjar lopak dari tahun 2020 sampai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel I. 3 : Jumlah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020-2024

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima (Orang)	Total Dana Desa Yang Dikeluarkan
1	Penerima BLT Tahun 2020 (Rp 600.000)	22 KK	RP 158.400.000
2	Penerima BLT Tahun 2021 (Rp 300.000)	19 KK	RP 68.400.000
3	Penerima BLT Tahun 2022 (Rp 300.000)	36 KK	RP 129.600.000
4	Penerima BLT Tahun 2023 (Rp 300.000)	20 KK	RP 72.000.000
5	Penerima BLT Tahun 2024 (Rp 300.000)	16 KK	RP 57.600.000
6	Total Dana Desa Tahun 2024 (25%) Rp 701.199.000		Rp 57.600.000

Sumber: Kantor Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai, 2024

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menjelaskan bahwa Dana Desa di tahun 2024 di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sebesar Rp 701.199.000. Dana Desa yang dikeluarkan untuk BLT tahun 2020 sebesar Rp 158.400.000 dengan jumlah penerima 22 KK. Pada Tahun 2021 dana desa yang dikeluarkan untuk BLT sebesar Rp 68.400.000 dengan jumlah penerima 19 KK. Pada Tahun 2022 dana desa yang dikeluarkan untuk BLT sebesar Rp 129.600.000 dengan jumlah penerima 36 KK. Pada Tahun 2023 dana desa yang dikeluarkan untuk BLT sebesar Rp 72.000.000 dengan jumlah penerima 20 KK. Dan di Tahun 2024 dana desa yang dikeluarkan untuk BLT sebesar Rp 57.000.000 dengan jumlah penerima 16 KK. Dimana setiap KK tahun 2020 mendapatkan Rp 600.000 perbulan selama satu tahun. Sedangkan di tahun 2021-2024 mendapatkan Rp 300.000 perbulan selama satu tahun.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, dikaitkan dengan kondisi rill sementara, penelitian menemukan beberapa fenomena atau permasalahan di

lapangan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menyalurkan BLT Dana Desa sebagai berikut:

- a. Tidak mendapatkan BLT atau belum terdata oleh pemerintah desa
- b. Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan
- c. Adanya lansia yang belum terdata di pemerintahan desa, sehingga lansia tersebut tidak mendapatkan BLT
- d. Masih adanya masyarakat yang belum tergolong lansia, tetapi mendapatkan BLT
- e. Penyaluran BLT yang tidak sesuai dengan kriteria atau tidak tepat sasaran
- f. Masih adanya usulan dari masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan satupun.

Permasalahan lain yang sering muncul pula yaitu masih banyak adanya keluarga atau rumah tangga yang sama miskinnya tetapi tidak mendapatkan BLT. Di sisi lain, ditemukan juga beberapa keluarga atau rumah tangga mampu yang menerima BLT. Dan permasalahan lainnya yaitu ada yang sudah terbilang jompo yang seharusnya layak mendapatkan BLT ini, tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Pemberian BLT di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik. Berupa konflik horizontal karena terjadi kecemburuan dan disharmoni antar masyarakat, serta sifatnya konflik vertikal karena sebagian masyarakat akan menuduh pemerintahan tidak adil dan

tidak benar dalam menyalurkan bantuan tersebut. BLT juga menimbulkan konflik di tingkat keluarga. Selain dampak terhadap timbulnya konflik, dampak lainnya adalah pemicu timbulnya korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis bermaksud akan meneliti lebih lanjut terkait dengan “Evaluasi bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah yang diungkapkan pada Latar Belakang maka penulis dalam penelitian akan merumuskan masalah adalah sebagai berikut : “ Bagaimana evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan program bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan Evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan kemampuan peneliti dan menambah pengetahuan tentang evaluasi program bantuan langsung tunai dana desa dalam pemulihan ekonomi di desa Banjar Lopak, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Pasolong (2016:8) Administrasi Negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Agar lebih memahami apa arti administrasi negara, maka kita bisa merujuk kepada pendapat para ahli tentang definisi administrasi negara. Berikut ini adalah pengertian administrasi negara menurut para ahli:

Menurut Anggara (2014:134) mengatakan bahwa administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga – lembaga disusun, digerakkan, dan dikemudikan.

Selanjutnya Dimock (dalam Anggara, 2016: 144) menambahkan bahwa administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya. Sejalan dengan pendapat di atas Thoha (dalam Anggara, 2016: 147) mengemukakan ilmu administrasi Negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik.

Bagi suatu negara yang berdemokrasi, tujuan administrasi negara adalah untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyatnya. Beberapa

keinginan yang ditetapkan oleh rakyat diantaranya; keamanan, kesejahteraan, ketertiban, keadilan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara keinginan rakyat, pelaksana harus melakukannya secara demokratis, yang disebut juga dengan *democratic administration* atau *open management*.

Administrasi negara merupakan institusi publik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup tatanan negara. Namun, kualitas pelaksanaan administrasi negara sulit diukur karena sangat kompleks, bersifat politis, dan multitafsir.

Menurut Henry (2016:19) mengatakan ruang lingkup administrasi negara terdiri dari:

1. Organisasi publik pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen Publik, mencakup beberapa hal penting seperti ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, evaluasi program, produktivitas, dan lain-lain.
3. Implementasi, yaitu pendekatan untuk kebijakan publik serta penerapannya, administrasi pemerintah, privatisasi dan etika birokrasi.

Berdasarkan uraian dan pengertian di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa pokok pikiran bahwa administrasi Negara adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggara, administrasi Negara disusun untuk mengatur antar bangsa, dan administrasi Negara diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dari suatu negara yang mana diselenggarakan untuk kepentingan umum.

2.1.2 Teori/Konsep Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2014:608) mengatakan istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam artian satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran.

Sedangkan Menurut Lester dan Stewart (dalam Hidayat et al.2018) bahwa Evaluasi ialah ditunjukan untuk melihat bagaimana melihat kegagalan suatu kebijakan publik dan untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dirumuskan dan dilaksanakan dengan menghasilkan target yang telah diinginkan.

Menurut Nugroho (2014) tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalah-nyalahkan, tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif, evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Menurut Sudirjo (dalam Rahmawati dan Amar, 2017) Evaluasi adalah mencakup beberapa kegiatan seperti pengukuran dan penilaian. Dilihat dari pengertian evaluasi tersebut dapat ditetapkan bahwa evaluasi adalah penilaian

aktivitas seseorang dalam melihat kegiatan yang dilakukan apakah sudah mencapai target atau belum. Dapat disimpulkan, dari penjelasan diatas bahwa evaluasi merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menemukan suatu hasil yang telah dikerjakan, tercapainya target yang diinginkan atau tidak.

Sudjana (dalam Rusydi Ananda, 2017: 3) memaknai evaluasi sebagai kegiatan mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data untuk masukan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang dan atau telah dilaksanakan. Produk evaluasi adalah tersusunnya nilai-nilai (*values*) seperti bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik atau buruk, berhasil atau tidak berhasil, diperluas atau dibatasi, dilanjutkan atau diberhentikan, dan sebagainya berkaitan dengan program yang sedang atau telah dilaksanakan.

Selanjutnya Rossi dan Freeman (dalam Wibawa 2017: 63) evaluasi program harus dapat menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian evaluasi yaitu: desain dan konseptualisasi program, implementasi program (monitoring dan akuntabilitas) serta kegunaan program (dampak dan efisiensi). Tujuan untuk mengevaluasi suatu program, peneliti harus menentukan nilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kata lain, hal yang terpenting dalam membuat evaluasi adalah tersedianya tujuan (*goals*) dan kriteria (*criteria*). Goals merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu program kegiatan, baik dinyatakan dalam global maupun dalam angka-angka. Sedangkan kriteria memastikan bahwa goals ditetapkan sebelum itu dapat dicapai dan dipenuhi secara memuaskan.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat bias dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria yang dikembangkan oleh Dunn (dalam Subarsono 2016: 126) dirangkum menjadi lima indikator sebagai berikut :

- a. Efektifitas
- b. Kecukupan
- c. Pemerataan
- d. Responsivitas
- e. Ketepatan

2.1.3 Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan yang bersumber dari dana desa. BLT-DD dalam pelaksanaannya diatur dalam “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 mengatur tentang rincian prioritas penggunaan dana desa tahun 2024.

Program BLT-DD merupakan Program Bantuan Langsung tunai yang berasal dari Pendapatan Asli Desa atau biasa disebut dengan nama “Dana Desa”. Munculnya program tersebut akibat adanya bencana yang diluar kendali manusia yaitu Covid-19 pada tanggal 2 maret tahun 2020. Pada masa itu Indonesia diheboakan oleh Covid-19 sehingga kegiatan- kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak diperbolehkan oleh pihak pemerintah, jadi hal inilah yang kemudian menimbulkan ekonomi masyarakat merosok dan bahkan ada beberapa orang yang kehilangan kerjanya akibat virus tersebut.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 ayat (1) Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk:

1. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% dari anggaran Dana Desa
2. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% dari anggaran Dana Desa
3. Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa
4. Program sector prioritas lainnya

BLT-Desa prioritas utama penggunaan Dana Desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa BLT-Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang kemudian sumber dari dana desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa, dan mengurangi dampak ekonomi. Sehingga

menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya.

Kriteria Penerima Manfaat BLT-DD di Desa Banjar Lopak adalah sebagai berikut;

1. Keluarga miskin atau tidak mampu dan berdomisili
2. Keluarga miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
3. Keluarga miskin yang tidak menerima bantuan sosial lainnya yang bersumber dari APBD ataupun APBN
4. Jompo yang mempunyai KK Tunggal
5. Jompo 60 Tahun keatas walaupun tidak KK Tunggal
6. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis

Adapun Jumlah BLT-DD yang diterima oleh Masyarakat senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke-12 (belas)/keluarga penerima manfaat. BLT-DD yang di peroleh masyarakat adalah bentuk uang tunai yang bertujuan untuk keperluan-keperluan pokok anggota masyarakat.

BLT menjadi salah satu instrument yang tidak kalah penting dalam penanganan atau pemberantasan kemiskinan, sebab dalam implementasinya BLT dinggap secara cepat dalam penerapannya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah proses pembagian-nya betul-betul menyentuh langsung anggota masyarakat sehingga apa yang kemudian menjadi kekurangan dalam penerapan-nya dapat langsung diketahui oleh pihak pemerintah setempat.

Sasaran dari program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah masyarakat miskin dan yang sedang sakit parah, dengan beberapa ketentuan yaitu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima bantuan langsung tunai BLT-DD tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Bantuan sosial menjadi sesuatu hal yang “menarik” banyak pihak karena banyak yang berkepentingan terhadap keberadaan bantuan sosial itu sendiri. Pemerintah membutuhkannya sebagai wujud program kebijakan yang harus dilakukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. DPR atau Wakil Rakyat melihatnya sebagai pelaksanaan kewajiban pemerintah dan perhatian mereka terhadap rakyat yang sudah memilihnya. Sedangkan masyarakat atau kelompok masyarakat membutuhkannya untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan.

2.1.4 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Dalam Permendes No 6 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020,

telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (dalam Nafida 2021: 875).

Mengacu pada peraturan di atas menjadi jelas, bahwa dana desa berasal dari APBN yang ditranfer melalui APBK dan diperuntukkan bagi desa. Dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa dana desa tidak melalui APBA. Sehingga, tidak subordinasi, melainkan koordinatif dengan Pemerintah. Terkait apa, dan bagaimana metode dan mekanismenya diatur dalam Permendes 6/2020. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes tersebut tegas didefinisikan bahwa BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk 15 miskin yang bersumberkan dari dana desa.

Alokasi BLT DD dihitung berdasarkan presentase dari total anggaran Dana Desa yang di terima Desa :

1. Desa yang menerima anggaran Dana Desa (DD) kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), mengalokasikan BLT DD sebesar 25% dari total anggaran Dana Desa.
2. Desa yang menerima anggaran Dana Desa mulai dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), mengalokasikan BLT DD sebesar maksimal 30% dari total anggaran Dana Desa.

3. Desa yang menerima anggaran Dana Desa melebihi Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), mengalokasikan BLT DD sebesar maksimal 35% dari total anggaran Dana Desa.

Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran Dana Desa yang dialokasikan dapat menambah Alokasi Anggaran Dana Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

2.1.5 Pengertian Desa

Secara Etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang bearti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Arenawati (2014:61) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kesatuan masyarakat hukum tersebut memiliki ekonomi.

Kemudian dijelaskan oleh Widjaja (2016: 3) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relative mandiri.

Desa memiliki wewenang yang tertuang sesuai berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yakni :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.1.6 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisik dalam kelompok tertentu.

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep ini tidak hanya berlaku pada masyarakat yang tidak memiliki pendapatan namun juga masyarakat yang memiliki pendapatan namun tidak cukup.

Menurut Tambunan (2019) kemiskinan dapat digolongkan dalam beberapa kategori yaitu :

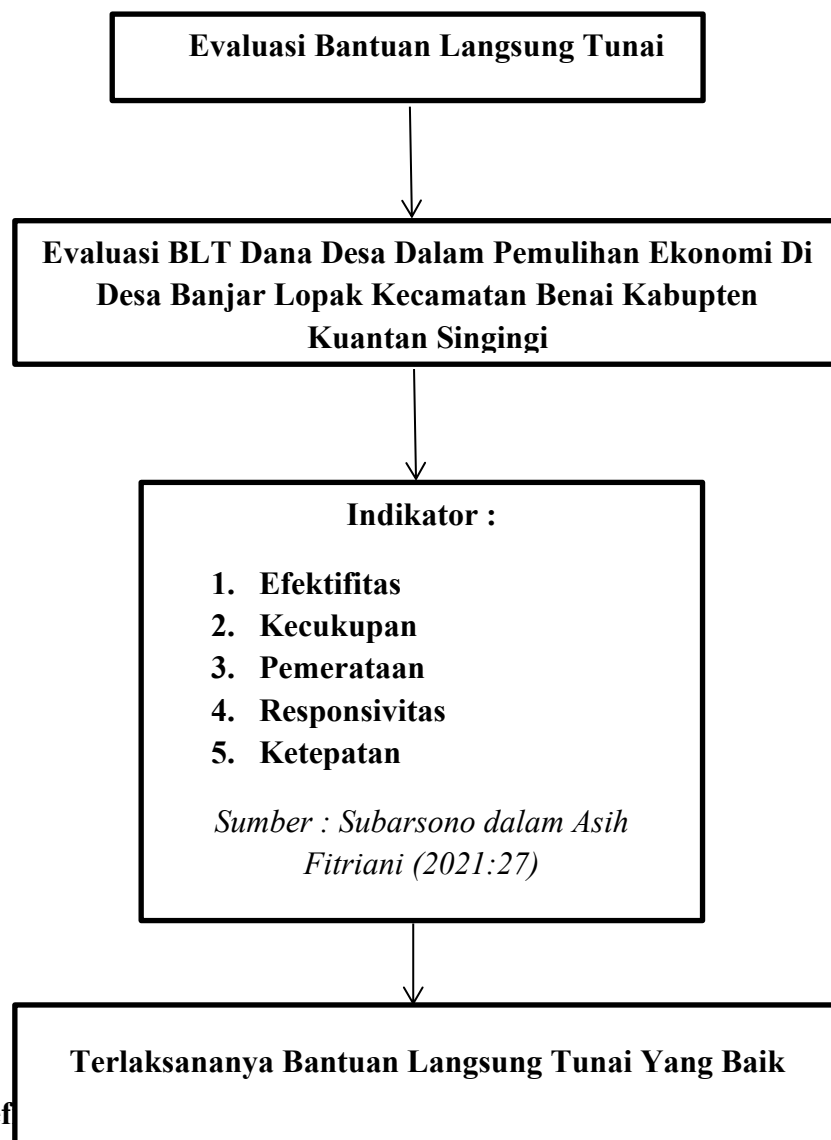
1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.
2. Kemiskinn relative adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan dalam distribusi pendapatan, dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi pendapatan.
3. Kemiskinan alamiah disebabkan oleh rendahnya kualitas smber daya manusia dan sumber daya alam.
4. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya penduduk yang malas tidak mau kerja keras, etos kerja sangat rendah, tidak disiplin dan sebagainya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka konsep adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema, dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya.

Bagan/Alur II. 1 : Kerangka Pemikiran tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi .



2.3 Def

Untuk memudahkan analisis data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan ini, maka penulis perlu membuat Konsep Operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulisan diantaranya:

1. Efektifitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu tindakan dianggap efektif jika hasilnya sesuai atau bahkan melebihi target yang diharapkan.
2. Kecukupan mengacu kepada sejauh mana sumber daya atau hasil suatu kegiatan memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Pemerataan merupakan distribusi hasil atau manfaat yang adil dan merata kepada semua pihak yang berhak. Dalam konteks sosial atau ekonomi, pemerataan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok atau individu.
4. Resposivitas merujuk pada kemampuan atau sistem, organisasi, atau individu untuk merespon atau kebutuhan, harapan, atau perubahan dengan cepat dan tepat. Ini mencakup kepekaan terhadap masalah serta kesiapan untuk memberikan solusi yang sesuai. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhanm, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
5. Ketepatan adalah sejauh mana suatu tindakan, keputusan, atau hasil sesuai dengan kebutuhan, sasaran, atau kondisi tertentu.

2.4 Konsep Variabel

Tabel II. 1 :Konsep Variabel Penelitian tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Desa Di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Judul	Indikator	Sub Indikator	Ket
1	Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi	a. Efektivitas	a. Pendataan b. Verifikasi c. Penetapan	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
		b. Kecukupan	a. Menetapkan kriteria penerima BLT b. Tepat kriteria	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
		c. Pemerataan	a. Pendataan menyeluruh b. Penetapan sesuai kriteria	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
		d. Responsivitas	a. Keterbukaan b. Komunikatif	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik
		e. Ketepatan	a. Tetap sasaran b. Tidak tepat sasaran	a. Baik b. Kurang baik c. Tidak baik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Fokus dalam penelitian ini adalah Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Resposivitas, dan Ketepatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif (*non-statistik*).

Pada dasarnya metode ini adalah penggambaran suatu kelompok sosial masyarakat, dalam satu objek, situasi kondisi, dan pemikiran, serta peristiwa dari masa sekarang. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau penjabaran secara sistematis untuk dapat lebih akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan atau objek penelitian. Sedangkan untuk analisis atau data penelitian, penulis menggunakan tehnik analisis kualitatif. Dalam menggunakan metode ini kita lebih diarahkan untuk lebih menekankan melalui Analisa data deduktif atau menggunakan pendekatan *top down* ataupun menggunakan Analisa terhadap dinamika antar fenomena yang ada dalam proses pengamatan di lokasi penelitian.

3.2 Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau data (dalam Alfatih, 2016: 84). Untuk lebih jelasnya informan pada penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III. 1 : Informan Penelitian Tentang Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Desa Di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa	1	4 %
2	Sekretaris Desa	1	4 %
3	Ketua BPD	1	4 %
4	Masyarakat Menerima BLT	16	67 %
5	Masyarakat Tidak Menerima BLT	5	21%
Total		24	100

Jadi jumlah informan dalam penelitian ini adalah 24 orang, teknik yang penulis gunakan adalah *Snowball Sampling*. Teknik *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017: 218-219)

3.3 Sumber Data Penelitian

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa informasi mengenai suasana lokasi dan tempat penelitian yang sebenarnya (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung.

3.3.2 Data Sekunder

Merupakan data yang secara tidak langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan melalui media internet yang berkaitan dengan evaluasi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dalam pemulihan ekonomi.

3.4 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan penulis bahas dan agar penelitian ini dapat dikerjakan secara fokus, maka perlu adanya fokus penelitian serta batasan-batasan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: “Bagaimana Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi “

3.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi penelitian, di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lokasi penelitian, karena lokasi tersebut memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

3.6 Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Melalui Metode Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan pengendalian informasi tentang fokus penelitian. Wawancara ialah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua atau lebih orang yang diarahkan dengan salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan. Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan,

organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain-lain (Salim, 2012:119).

3.6.2 Melalui Metode Observasi

Menurut Sutrisno (dalam Sugiyono, 2014: 165) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3.6.3 Melalui Metode Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Pengumpulan Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Proses setelah dilakukannya pengumpulan data, maka proses reduksi data dengan memilih, menggolongkan data yang dibutuhkan dan membuang yang tidak dibutuhkan. Sehingga menjadi lebih sederhana dan dapat memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang akan dilakukan pada tahap display data yang dilakukan peneliti dengan cara memilih dan menggolongkan data yang diperoleh.

3.7.2 Analisis Data

Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis (Harahap, 2020:90)

Kategori dalam penilaian yaitu sebagai berikut :

- a. Sangat Baik (SB) jika 5 kategori terpenuhi
- b. Baik (B) jika 4 kategori terpenuhi
- c. Cukup Baik (CB) jika 3 kategori terpenuhi
- d. Tidak Baik (TB) jika 4 kategori terpenuhi
- e. Sangat Tidak Baik (STB) jika 5 kategori terpenuhi

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan Verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dimaknai sebagian penarikan arti data yang telah ditampilkan. Penarikan Kesimpulan yang dilakukan bukanlah kesimpulan akhir karena penulis dapat saja melakukan penelitian kembali untuk memperdalam penelitian yang lalu kesimpulan kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencaharian ulang yang digunakan, ke cakupan penelitian dan tuntutan-tuntutan pemberian data, tetapi sering kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkan “secara induktif”.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Banjar Lopak sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat sebagian kecil penerima yang kurang tepat menurut kriteria yang telah ditentukan.

5.2 Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sebagai masukan terhadap Evaluasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa Banjar Lopak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

1. Pemerintah Desa diharapkan agar lebih teliti lagi dalam hal verifikasi data Penerima Bantuan Lansung Tunai (BLT), agar tidak terdapat lagi masyarakat yang menerima bantuan yang tidak termasuk kedalam kriteria yang telah ditentukan.
2. Diharapkan kepada pemerintah desa agar lebih meningkatkan sosialisasi tentang kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang beranggapan bahwa pemberian BLT DD ini tidak tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia. Bandung.

Arenawati, 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.